

Bab III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi

Keberhasilan pembangunan ekonomi di Kota Cirebon tentunya tidak lepas dari usaha Pemerintah Kota Cirebon dalam mewujudkan Visi Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yaitu “Terwujudnya Kota Cirebon sebagai Kota yang Religius, Aman, Maju, Aspiratif dan Hijau (RAMAH) pada Tahun 2018”.

Salah satu Misinya adalah Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Kota Cirebon dalam Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi untuk mensejahterakan masyarakat.

Khusus untuk bidang ekonomi pembangunan lebih ditingkatkan secara bersamaan antara pertumbuhan ekonomi dengan upaya pemerataan pendapatan, dengan harapan akan meningkatkan daya beli secara merata dalam memenuhi segala kebutuhan masyarakat.

3.1.1. Kondisi Ekonomi Kota Cirebon Tahun 2013

Kondisi perekonomian Kota Cirebon pada Tahun 2013 secara umum mengalami pertumbuhan yang positif, kecuali sektor pertanian. Bila pada Tahun 2011 Kota Cirebon mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 5,93 % dan pada Tahun 2012 tumbuh 5,57 %, maka pada tahun 2013 pertumbuhannya sebesar 4,79 %.

Kondisi ekonomi daerah yang diukur berdasarkan nilai PDRB menunjukkan bahwa pada tahun 2013 PDRB Kota Cirebon yang dihitung



Atas Dasar Harga Berlaku mencapai angka Rp. 14,698 trilyun atau mengalami peningkatan sebesar 10,79 % dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp. 13,267 trilyun. Sedangkan nilai PDRB secara riil yang dilihat dari PDRB yang didasarkan Atas Dasar Harga Konstan mencapai angka Rp.6,148 trilyun sementara pada tahun 2012 mencapai angka Rp.5,867 trilyun. Dengan membandingkan angka di kedua tahun tersebut terlihat bahwa PDRB atas dasar harga konstan tahun 2013 telah tumbuh sebesar 4,79 % sebagai indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE). Angka LPE ini ternyata menunjukkan pertumbuhan yang lebih kecil dari LPE tahun sebelumnya yang mencapai 5,57 %. Penurunan angka LPE sebesar 0,78 poin dari LPE tahun sebelumnya menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di tahun ini mengalami sedikit perlambatan.

Secara umum kegiatan ekonomi dikelompokkan menjadi tiga sektor ekonomi yaitu :

1. Sektor Primer, yaitu sektor yang tidak mengolah bahan mentah atau bahan baku melainkan hanya mendayagunakan sumber-sumber alam seperti tanah dan deposit didalamnya. Yang termasuk kelompok ini adalah sektor pertanian serta sektor pertambangan dan penggalian.
2. Sektor Sekunder, yaitu sektor yang mengolah bahan baku, baik yang berasal dari sektor primer maupun sektor sekunder menjadi barang lain yang lebih tinggi nilainya. Sektor Sekunder mencakup sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas, air bersih dan sektor bangunan/konstruksi.
3. Sedangkan Sektor Tersier atau dikenal juga sebagai sektor jasa-jasa, yaitu sektor- sektor yang tidak memproduksi dalam bentuk fisik melainkan dalam bentuk jasa. Yang termasuk sektor ini



adalah sektor perdagangan, sektor pengangkutan dan komunikasi, bank dan lembaga keuangan, sewa rumah, pemerintahan dan jasa- jasa.

Tabel 3.1

Produk Domestik Regional Bruto Kota Cirebon

Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010 – 2013 (Milyar Rupiah)

Kelompok/Lapangan Usaha	2010	2011 ^{*)}	2012 ^{*)}	2013 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I. Primer	39,25	42,23	40,85	46,96
1. Pertanian	39,25	42,23	40,85	46,96
2. Pertambangan	-	-	-	-
II. Sekunder	3.359,22	3.711,48	4.045,64	4.443,98
3. Industri	2.435,68	2.660,56	2.896,28	3.173,00
4. Listrik Gas dan Air	260,84	274,04	295,95	334,39
5. Bangunan	662,69	776,89	853,42	936,59
III. Tersier	7.532,97	8.363,34	9.180,40	10.207,21
6. Perdagangan	3.873,59	4.263,72	4.703,24	5.211,90
7. Pengangkutan	1.619,65	1.859,28	2.020,66	2.272,30
8. Lembaga Keuangan	1.166,95	1.271,04	1.397,31	1.546,02
9. Jasa-jasa	872,78	969,31	1.059,20	1.176,98
PDRB	10.931,43	12.117,05	13.266,90	14.698,15

Keterangan: *) Angka Perbaikan

**) Angka Sementara

Dari pengelompokkan tersebut tampak bahwa kelompok tersier masih mendominasi dalam penciptaan nilai tambah di Kota Cirebon. Total Nilai Tambah Bruto (NTB) atas dasar harga berlaku dari kelompok sektor tersier di tahun 2013 mencapai Rp. 10.207,21 milyar, atau meningkat 11,18 % dibandingkan tahun sebelumnya. Kelompok sekunder



mengalami peningkatan sebesar 9,85 % yaitu dari Rp. 4.045,64 milyar di Tahun 2012 menjadi Rp. 4.443,98 milyar di Tahun 2013. Kelompok primer mengalami peningkatan sebesar 14,96 % atau dari Rp. 40,85 milyar pada tahun 2012 menjadi Rp. 46,96 milyar di tahun 2013

Tabel 3.2

Produk Domestik Regional Bruto Kota Cirebon

Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2010 – 2013 (Milyar Rupiah)

Kelompok/Lapangan Usaha (1)	2010 (2)	2011 ^{*)} (3)	2012 ^{*)} (4)	2013 ^{**)} (5)
I. Primer	20,43	20,77	19,78	20,01
1. Pertanian	20,43	20,77	19,78	20,01
2. Pertambangan	-	-	-	-
II. Sekunder	1.921,12	2.010,38	2.126,68	2.245,28
3. Industri	1.516,44	1.568,91	1.661,73	1.749,28
4. Listrik Gas dan Air	128,49	131,91	140,07	148,66
5. Bangunan	276,19	309,57	324,89	347,34
III. Tersier	3.305,31	3.526,80	3.720,88	3.883,04
6. Perdagangan	1.649,62	1.716,22	1.817,09	1.893,76
7. Pengangkutan	732,04	822,64	863,37	898,00
8. Lembaga Keuangan	459,03	496,67	524,43	552,84
9. Jasa-jasa	464,62	491,28	515,99	538,44
PDRB	5.246,86	5.557,95	5.867,35	6.148,33

Keterangan: *) Angka Perbaikan **) Angka Sementara

Sumber: BPS Kota Cirebon, 2014

Berdasarkan harga konstan 2000, baik kelompok primer, sekunder maupun tersier selama tahun 2013 menunjukkan kinerja yang meningkat. Kondisi ini berbeda dari tahun sebelumnya dimana kelompok primer mengalami sedikit penurunan kinerja.



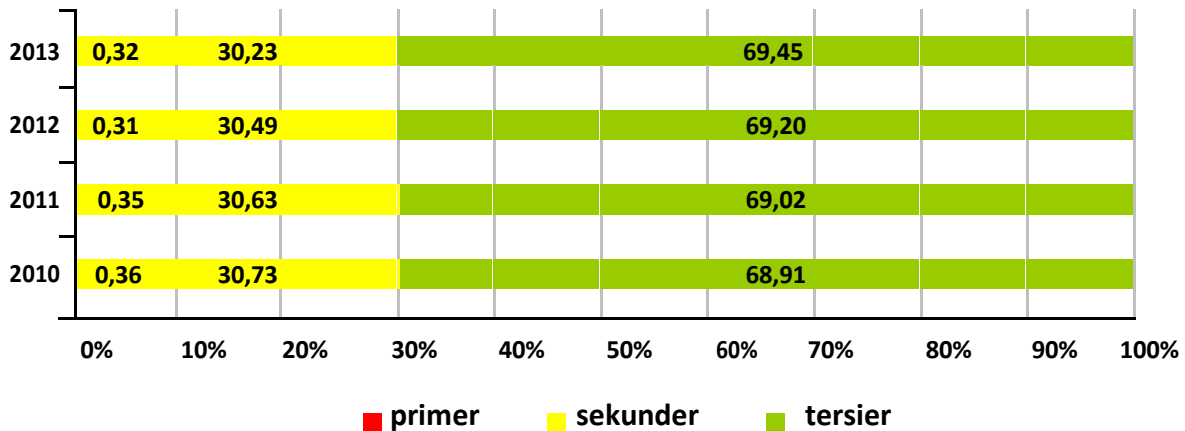
PDRB kelompok sektor tersier yang merupakan sektor-sektor pendukung dari seluruh kegiatan ekonomi, pada Tahun 2012 sebesar Rp. 3.720,88 milyar naik menjadi Rp. 3.883,04 milyar pada Tahun 2013. Kelompok primer yang terdiri dari sektor pertanian pada Tahun 2013 sebesar Rp. 20,01 milyar sedangkan pada tahun 2012 mencapai Rp. 19,78 milyar atau mengalami peningkatan sebesar 1,14 %. Kelompok sektor sekunder yang terdiri dari sektor industri pengolahan, listrik, gas, air bersih dan bangunan pada Tahun 2013 mencapai Rp. 2.245,28 milyar sedangkan pada tahun 2012 sebesar Rp. 2.126,68 milyar atau mengalami peningkatan sebesar 5,58 %.

Distribusi persentase PDRB menurut lapangan usaha menunjukkan peranan masing-masing sektor dalam sumbangannya terhadap PDRB secara keseluruhan. Semakin besar persentase suatu sektor, semakin besar pula pengaruh sektor tersebut di dalam perkembangan ekonomi suatu daerah. Distribusi persentase juga dapat memperlihatkan kontribusi nilai tambah setiap sektor dalam pembentukan PDRB sehingga akan tampak sektor-sektor yang menjadi pemicu pertumbuhan (sektor andalan) di wilayah yang bersangkutan. Semakin besar peranan suatu sektor dalam perekonomian, dapat dikatakan bahwa sektor tersebut sebagai engine growth atau mesin pertumbuhan ekonomi daerah.

Pada Grafik 3.1 diperlihatkan struktur ekonomi Kota Cirebon pada Tahun 2010-2013 menurut kelompok sektor primer, sekunder dan tersier. Dalam kurun waktu tersebut nampak sekali bahwa kelompok sektor primer dan sekunder mengalami penurunan kontribusi yang cukup signifikan. Hal ini disebabkan kinerja sektor pertanian dan industri yang semakin tertinggal perkembangannya dari sektor-sektor lainnya. Pada kelompok sektor primer kontribusinya yaitu dari 0,36 % di

Tahun 2010 menjadi 0,32 % di Tahun 2013. Kontribusi kelompok sektor sekunder dari 30,73 % di Tahun 2010 menjadi 30,23 % di tahun 2013

Grafik 3.1. Struktur Ekonomi Kota Cirebon Tahun 2010 – 2013



Sumber: BPS Kota Cirebon, 2014

Sementara itu kelompok sektor tersier terlihat semakin memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian Kota Cirebon. Kontribusinya meningkat dari 68,91 % di Tahun 2010 menjadi 69,45 % di Tahun 2013. Kelompok sektor tersier ini sangat didukung oleh sektor perdagangan

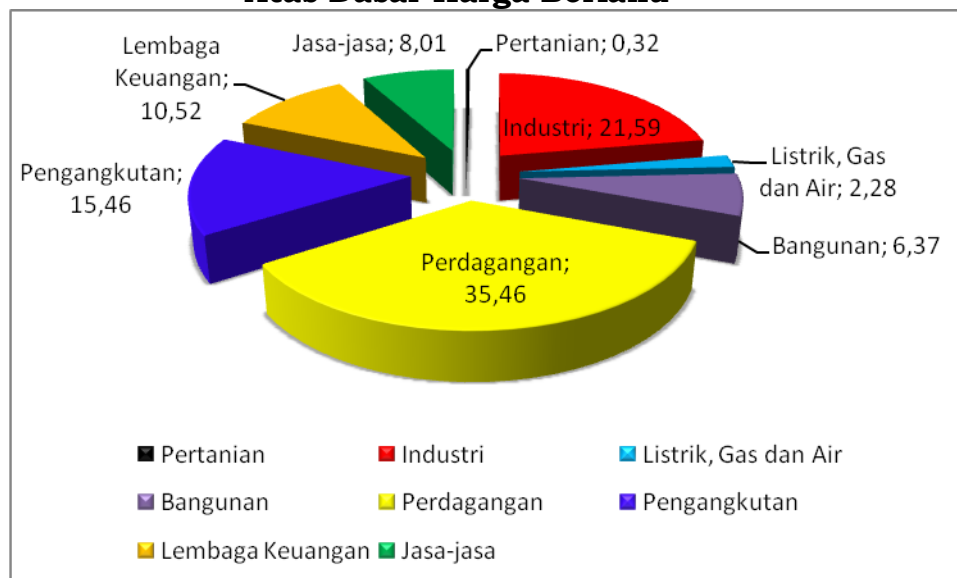
Di Kota Cirebon sektor pertanian merupakan sektor yang memberi kontribusi paling kecil dibandingkan dengan sektor lainnya. Pada Tahun 2013 distribusi sektor pertanian atas dasar harga berlaku sebesar 0,32 % mengalami sedikit peningkatan dibandingkan dengan Tahun 2012 yang sebesar 0,31 %

Kelompok sektor sekunder yang didukung oleh sektor industri, sektor listrik, gas dan air (LGA) serta sektor bangunan kontribusinya terhadap pembentukan PDRB Kota Cirebon dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Penurunan kontribusi pada kelompok ini disebabkan karena menurunnya kontribusi sektor industri terhadap PDRB. Sedangkan besaran kontribusi masing-masing sektornya

adalah sebagai berikut; sektor industri sebesar 21,59 % , sektor LGA sebesar 2,28 % dan sektor bangunan sebesar 6,37 %.

Kelompok sektor tersier selalu memberikan kontribusi tertinggi dibandingkan kelompok sektor yang lainnya dan senantiasa mengalami peningkatan. Jika pada Tahun 2012 kontribusi sektor tersier sebesar 69,20 % maka pada Tahun 2013 sebesar 69,45 %. Kelompok sektor tersier ini didukung oleh sektor perdagangan sebesar 35,46 % yang memberikan kontribusi tertinggi bagi PDRB Kota Cirebon, sektor pengangkutan dan komunikasi dengan kontribusi sebesar 15,46 % , sektor lembaga keuangan dengan kontribusi sebesar 10,52 % , dan sektor jasa dengan kontribusi sebesar 8,01 %.

Grafik 3.2. : Distribusi PDRB Kota Cirebon 2013 Atas Dasar Harga Berlaku



Dengan melihat pada Tabel 3.2 dapat diketahui bahwa struktur perekonomian Kota Cirebon sejak beberapa tahun ke belakang sangat didukung oleh sektor perdagangan dan sektor industri dengan kontribusi masing-masing merupakan penyumbang terbesar bagi pembentukan PDRB



Kota Cirebon. Pada sektor industri kegiatan usaha didominasi pada dua jenis usaha besar yaitu industri makanan ternak dan jaring dimana sebagian besar produknya dipasarkan ke luar Kota Cirebon. Sedangkan sektor perdagangan kegiatan usahanya cukup beragam yaitu mulai dari pedagang kecil sampai ke pedagang besar. Tingginya kontribusi di sektor ini dapat dimengerti karena Kota Cirebon merupakan kota niaga.

Tingginya kontribusi sektor sekunder dan sektor tersier berarti pula bahwa roda ekonomi Kota Cirebon separuhnya masih digerakkan oleh usaha bidang perdagangan dan jasa serta industri sebagai penggerak utama perputaran ekonomi di Kota Cirebon. Secara fisik kegiatan ekonomi di sektor perdagangan dan jasa dapat dilihat hampir di setiap wilayah Kota Cirebon. Besarnya rentang PDRB sektor primer dan tersier merupakan gambaran yang cukup kuat bahwa basis kegiatan ekonomi Kota Cirebon tidak bersumber dari kekayaan alam yang terdapat di Kota Cirebon

Secara umum, pada Tahun 2013 perekonomian Kota Cirebon mengalami pertumbuhan positif sebesar 4,79 %. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh sektor bangunan yang pertumbuhannya mencapai 6,91 persen. Selanjutnya diikuti oleh sektor listrik, gas dan air bersih, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan serta sektor industri pengolahan dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 6,13 %, 5,42 % dan 5,27 %

Apabila laju pertumbuhan ekonomi Kota Cirebon dipakai sebagai dasar (Base Line), maka kinerja sektoral dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok. Kelompok Pertama adalah : adalah sektor yang berhasil mencapai pertumbuhan di atas rata-rata (4,79 %); Kelompok Kedua: adalah sektor yang berhasil mencapai pertumbuhan positif walaupun masih dibawah LPE rata-rata.

Tabel 3.3
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Cirebon
Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2010 – 2013 (%)

SEKTOR	2010	2011 ^{*)}	2012 ^{*)}	2013 ^{**)}
1. Pertanian	8,14	1,62	-4,73	1,44
2. Pertambangan	-	-	-	-
3. Industri	-10,23	3,46	5,92	5,27
4. Listrik, Gas, Air Bersih	11,95	2,66	6,18	6,13
5. Bangunan	9,78	12,08	4,95	6,91
6. Perdagangan	7,67	4,04	5,88	4,22
7. Pengangkutan	17,38	12,38	4,95	4,01
8. Keuangan	16,91	8,20	5,59	5,42
9. Jasa	7,72	5,74	5,03	4,35
TOTAL	3,81	5,93	5,57	4,79

Dari tabel 4 terlihat bahwa pertumbuhan sektor yang termasuk pada kelompok pertama yaitu sektor industri pengolahan; listrik, gas dan air bersih; bangunan; serta keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor bangunan.

Sektor bangunan tumbuh pesat di Tahun 2013 hingga mencapai 6,91 %. Banyaknya proyek pembangunan pusat perbelanjaan, hotel dan perumahan mampu menjadi faktor pendongkrak pertumbuhan ekonomi di Kota Cirebon. Disamping itu proyek perbaikan jalan dan gedung kantor serta fasilitas umum lainnya memiliki peran dalam penciptaan nilai tambah bruto pada sektor bangunan. Selama Tahun 2013 tercatat ada sebanyak 96 ajuan ijin pemanfaatan ruang di Kota Cirebon,



diantaranya 23 untuk ijin pembangunan hotel dan 22 untuk ijin perumahan.

Sektor listrik, gas dan air bersih mampu tumbuh sebesar 6,13 %. Pertumbuhan sektor ini sangat didukung oleh subsektor listrik dan gas kota yang mengalami pertumbuhan masing-masing sebesar 5,66 % dan 12,50 %. Peningkatan jumlah pelanggan di kedua sub sektor ini akibat maraknya tempat hunian baru serta tempat-tempat belanja selama Tahun 2013.

Pertumbuhan sektor industri pengolahan mencapai 5,27 % pada tahun ini. Nampaknya geliat sektor industri perlahan mulai meningkat setelah mengalami penurunan kinerja pada Tahun 2010 dan mengalami perlambatan di Tahun 2011. Sementara itu dengan banyaknya usaha-usaha baru yang tumbuh di Kota Cirebon telah mendorong peningkatan nilai tambah pada sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan.

Pertumbuhan sektor yang termasuk pada kelompok kedua adalah kelompok sektor pertanian; perdagangan, hotel dan restoran; pengangkutan dan komunikasi; serta jasa-jasa. Sektor jasa-jasa merupakan sektor yang mengalami pertumbuhan tertinggi pada kelompok ini.

Kinerja sektor pertanian pada tahun ini mengalami peningkatan sebesar 1,44 % setelah mengalami penurunan pada Tahun 2012. Penyumbang terbesar pertumbuhan di sektor ini adalah sub sektor tanaman perkebunan sebesar 3,76 %. Pertumbuhan sub sektor perikanan juga meningkat sebesar 3,20 %, disusul sub sektor peternakan yang mengalami peningkatan 2,40 %. Sedangkan untuk sub sektor tanaman



bahan makanan selama 3 (tiga) tahun ini mengalami penurunan kinerja.

Sektor perdagangan, hotel dan restoran merupakan salah satu motor penggerak ekonomi Kota Cirebon. Meningkatnya kegiatan usaha di sektor perdagangan, hotel dan restoran dikarenakan Kota Cirebon merupakan basis kegiatan ekonomi di wilayah III Cirebon.

Dengan didukung jumlah hotel bintang dan non bintang yang cukup banyak serta letak yang strategis, Kota Cirebon menjadi pilihan bagi para pelaku ekonomi untuk memilih sarana akomodasi. Begitupula untuk kegiatan usaha restoran, Kota Cirebon dengan banyak makanan khas seperti nasi jambang, empal gentong dan sea food serta makanan khas lain menjadikan usaha di bidang restoran dapat berkembang dengan pesat.

Pada Tahun 2013 sektor ini mampu tumbuh sebesar 4,22 %. Angka ini menunjukkan adanya perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya yang mampu tumbuh hingga 5,88 %. Hal tersebut dikarenakan adanya penurunan kunjungan wisatawan mancanegara hingga 50 % pada Tahun 2013. Kondisi ini juga berpengaruh pada tingkat kunjungan hotel yang juga mengalami penurunan yang signifikan.

Sektor pengangkutan dan komunikasi tumbuh sebesar 4,01% . Pertumbuhan sektor ini sangat didukung oleh sub sektor komunikasi yang mengalami pertumbuhan sebesar 6,57 %. Kemajuan di bidang komunikasi ini diwarnai oleh makin beragamnya teknologi informasi. Pada saat ini alat komunikasi lebih kompetitif dengan berbagai fasilitas yang tersedia serta harga yang bersaing. Dengan kondisi yang demikian jumlah pengguna alat komunikasi makin bertambah dari waktu ke waktu.



Pertumbuhan sektor jasa-jasa mencapai 4,35 %. Pada tahun ini sub sektor jasa swasta yang terdiri dari jasa sosial kemasyarakatan, jasa hiburan dan rekreasi serta jasa perorangan dan rumah tangga tumbuh sebesar 8,57 %. Sub sektor pemerintahan umum tumbuh sebesar 2,28 %. Sub sektor ini merupakan salah satu lapangan kegiatan ekonomi masyarakat yang cukup dominan di Kota Cirebon.

Indikator yang sering dipakai untuk menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat secara makro adalah pendapatan per kapita atau Percapita Income. Semakin tinggi pendapatan yang diterima penduduk di suatu wilayah maka tingkat kesejahteraan di wilayah yang bersangkutan dapat dikatakan bertambah baik.

Dengan mengasumsikan bahwa pendapatan faktor produksi dan transfer yang mengalir keluar sama dengan pendapatan dan transfer yang mengalir masuk, maka nilai pendapatan regional dianggap sama besar dengan nilai PDRB. Asumsi ini digunakan karena sulitnya untuk mendapatkan data pendapatan faktor produksi dan transfer yang masuk dan keluar. Angka PDRB per kapita di sini di peroleh dengan cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

Jumlah penduduk yang dipakai dalam estimasi pendapatan per kapita adalah proyeksi penduduk yang didasarkan pada data hasil Sensus Penduduk Tahun 2010. Perhitungan proyeksi penduduk menggunakan laju pertumbuhan penduduk pertengahan tahun. Meskipun pendapatan per kapita dihitung dengan menggunakan komponen PDRB tetapi bukan berarti bahwa PDRB dinikmati oleh seluruh penduduk suatu wilayah, karena PDRB merupakan nilai tambah dari suatu proses kegiatan baik produksi maupun jasa. Sehingga PDRB lebih menggambarkan produk yang dihasilkan oleh suatu wilayah tertentu. Dengan demikian



pendapatan per kapita yang sebenarnya relatif lebih kecil dibandingkan dengan PDRB per kapita hasil perhitungan ini.

Tabel 5 memperlihatkan bahwa PDRB per kapita Kota Cirebon terus mengalami peningkatan yang cukup tinggi selama periode 2010-2013. Pada tahun 2010 PDRB per kapita atas dasar harga berlaku di Kota Cirebon mencapai Rp. 36,86 juta dan mengalami peningkatan menjadi Rp. 48,30 juta pada Tahun 2013. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, PDRB per kapita Tahun 2013 mengalami pertumbuhan sebesar 9,84 %.

Kendati demikian peningkatan PDRB per kapita di atas masih belum menggambarkan secara riil kenaikan daya beli masyarakat Kota Cirebon secara umum. Hal ini disebabkan pada PDRB per kapita yang dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku masih terkandung faktor inflasi yang sangat berpengaruh terhadap daya beli masyarakat

Tabel 3.4
PDRB Per Kapita Kota Cirebon dan Laju Pertumbuhannya

Tahun	ADH Berlaku (Juta Rupiah)	Pertumbuhan (persen)	ADH Konstan 2000 (Juta Rupiah)	Pertumbuhan (persen)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2010	36,86	10,04	17,69	3,21
2011 ^{*)}	40,51	9,90	18,58	5,03
2012 ^{*)}	43,97	8,56	19,45	4,67
2013 ^{**)}	48,30	9,84	20,20	3,90

Keterangan: *) Angka Perbaikan
**) Angka Sementara

Untuk memantau perkembangan daya beli masyarakat secara riil bisa digunakan PDRB per kapita yang dihitung dari PDRB atas dasar



harga konstan. Dari tabel 5 dapat terlihat bahwa PDRB per kapita yang dihitung dari PDRB atas dasar harga konstan pada Tahun 2010 sebesar Rp. 17,69 juta dan mengalami pertumbuhan menjadi Rp. 20,20 juta pada Tahun 2013. Secara riil daya beli masyarakat tumbuh sebesar 3,90 % dibandingkan Tahun 2012.

Walaupun PDRB per kapita di Kota Cirebon relatif tinggi, sebenarnya angka tersebut bukan merupakan cerminan rata-rata pendapatan absolut yang diterima oleh penduduk. Karena komponen PDRB yang dimaksud terdiri dari surplus usaha, pembentukan modal, penyusutan dan upah gaji, sehingga tidak semua komponen PDRB tersebut dinikmati oleh penduduk.

Faktor lain yang juga menyebabkan PDRB per kapita Kota Cirebon cukup besar adalah jumlah penduduk Kota Cirebon relatif kecil. Sehingga bisa dimengerti mengingat Kota Cirebon mempunyai karakteristik seperti kota metropolitan yaitu jumlah penduduk struktural lebih rendah jika dibandingkan dengan jumlah penduduk secara fungsional.

3.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Memasuki Tahun 2013 pertumbuhan perekonomian 26 kabupaten/kota di Jawa Barat mengalami perlambatan dibanding pertumbuhan pada tahun sebelumnya. Pada Tahun 2013, laju pertumbuhan ekonomi 26 kabupaten/kota di Jawa Barat sebesar 5,40 % sedangkan pada Tahun 2012 pertumbuhannya sebesar 6,02 %.

Kinerja perekonomian yang melambat juga dialami oleh 2 (dua) kabupaten/kota di wilayah III yaitu Kabupaten Indramayu dan Kota Cirebon. Kabupaten Indramayu yang mempunyai peranan terbesar

terhadap PDRB di wilayah III mengalami pertumbuhan sebesar 3,33 % pada Tahun 2013. Pada tahun sebelumnya pertumbuhan ekonomi yang terjadi di kabupaten tersebut mencapai 5,03 %. Sementara Kota Cirebon yang pada Tahun 2012 mencapai nilai LPE tertinggi di wilayah III mengalami pertumbuhan sebesar 4,79 %. Sedangkan Kabupaten Kuningan, Cirebon dan Majalengka mengalami pertumbuhan yang lebih tinggi pada Tahun 2013 dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 3.5

Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Atas Dasar Harga Konstan 2000
Wilayah III Cirebon Tahun 2012-2013
(Termasuk Minyak dan Gas Bumi)
(Persen)

Kabupaten/Kota (1)	2012*) (2)	2013**) (3)
1. Kab. Kuningan	4,73	4,84
2. Kab. Cirebon	4,81	4,83
3. Kab. Majalengka	4,76	4,87
4. Kab. Indramayu	5,03	3,33
5. Kota Cirebon	5,57	4,79
26 Kab/Kota	6,02	5,40

Keterangan: *) Angka Perbaikan

**) Angka Sementara

3.3 Inflasi

Berdasarkan hasil pemantauan BPS pada Januari 2015, Kota Cirebon mengalami deflasi 0,13 %, atau terjadi penurunan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 117,11 pada Desember 2014 menjadi 116,96 pada Januari 2015. Tingkat inflasi tahun kalender (Januari 2015) dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Januari 2015 terhadap Januari 2014) masing-masing sebesar -0,13 dan 6,22 persen.

Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh kenaikan indeks beberapa kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok bahan makanan 2,09 %; kelompok makanan jadi 0,01 %; kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar 0,21 %; kelompok sandang 0,41 %; kelompok kesehatan 0,28 %

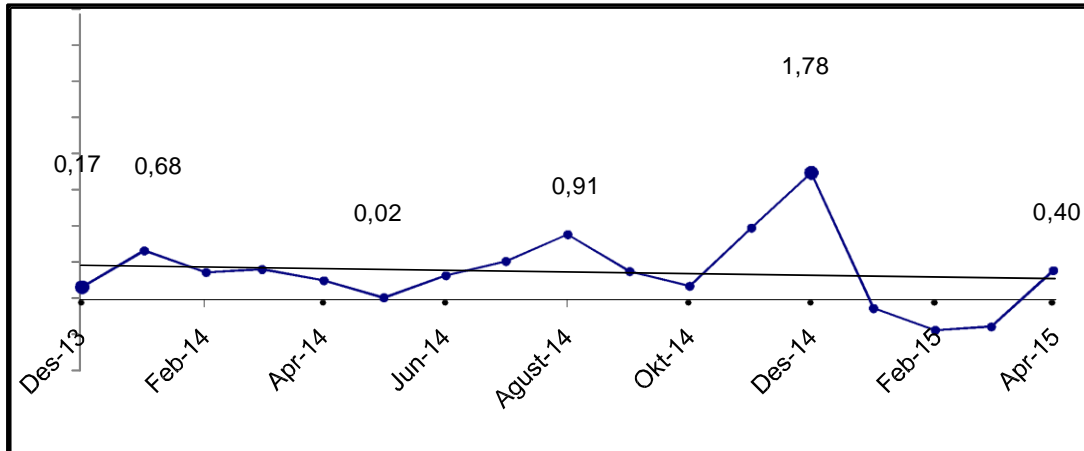
Deflasi terjadi karena adanya penurunan harga yang ditunjukkan oleh penurunan indeks yaitu kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 5,86 %. Beberapa komoditas yang mengalami **kenaikan harga** pada Januari 2015 antara lain: beras, telur ayam ras, dan daging ayam ras. Sedangkan komoditas yang mengalami **penurunan harga** antara lain bensin dan cabai merah.

Kelompok komoditas yang memberikan andil/sumbangan inflasi pada Januari 2015, yaitu: kelompok bahan makanan 0,4444 persen; kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau 0,0016 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar 0,0466 %; kelompok sandang 0,0189 %; kelompok kesehatan 0,0103 %; Sedangkan kelompok komoditas yang memberikan



sumbangan deflasi adalah kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan 0,6549 %.

Gambar 3.3
Perkembangan Inflasi Kota Cirebon
Desember 2013–April 2015





3.3.1. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2014 – 2015.

Gambaran ekonomi Kota Cirebon tahun 2014-2015 dipengaruhi perkembangan lingkungan eksternal sebagai berikut :

Pertama, perkembangan globalisasi yang semakin meningkatkan integrasi perekonomian regional seperti menyatunya pasar Asia Tenggara yang terintegrasi dalam Asean Free Trade Area (AFTA). Keadaan ini disatu pihak akan menciptakan peluang yang lebih besar bagi perekonomian daerah, tetapi dilain pihak juga menuntut daya saing perekonomian yang lebih tinggi. Dorongan eksternal bagi perekonomian Kota Cirebon , antara lain berasal dari : perekonomian nasional terutama dari koridor ekonomi Jawa Bagian Utara – Bali, perekonomian kawasan regional Jawa Barat khususnya di Wilayah Cirebon yang telah diagendakan pembangunan infrastruktur strategis di wilayah hinterland. Dorongan eksternal selain menciptakan peluang dan menjadi pesaing dalam perekonomian namun juga sangat mempengaruhi perekonomian Kota Cirebon dari sisi permintaan antara lain untuk konsumsi rumah tangga seperti kebutuhan pokok bahan makanan selain dipengaruhi oleh pengaruh iklim global juga dipengaruhi oleh pasar komoditas pangan global, nasional maupun regional, hal ini disebabkan karena sebagian besar kebutuhan pokok khususnya pangan bagi masyarakat Kota Cirebon dipasok dari luar daerah termasuk dari daerah hinterland, sehingga aspek distribusi dan pasokan mempengaruhi indeks harga konsumen (IHK) di Kota Cirebon yang selalu tinggi.

Kedua, dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), maka perekonomian daerah sangat tergantung pada perekonomian nasional, meskipun potensi timbulnya krisis



ekonomi nasional menurun, namun potensi ketidakpastian eksternal tetap tinggi yang antara lain berasal dari kemungkinan melambatnya pertumbuhan ekonomi negara-negara industri paling maju seperti Amerika Serikat, Eropa dan Jepang, tingginya harga minyak bumi yang menyebabkan meningkatnya subsidi, menurunnya arus penanaman modal dan terpusatnya arus modal pada beberapa daerah maju.

Ketiga, penetapan standar produk dan regulasi dari negara maju yang cenderung tidak dapat dipenuhi oleh daerah-daerah yang baru berkembang.

Adapun lingkungan internal yang diperkirakan berpengaruh positif terhadap perekonomian Kota Cirebon dalam tiga tahun mendatang adalah sebagai berikut :

- Kota Cirebon letaknya sangat strategis menjadi counter magnet bagi daerah hinterland dan daerah perbatasan provinsi;
- sebagai simpul pergerakan orang maupun barang antar provinsi dan antar kabupaten;
- memiliki sarana dan prasarana pendukung perekonomian yang lengkap dan merupakan kota dagang yang telah maju sejak abad ke XIV.

Berbagai langkah kebijakan untuk meningkatkan investasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi secara bertahap, dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi diprediksi masih didorong konsumsi rumah tangga dan investasi. Pertumbuhan konsumsi masyarakat diperkirakan akan terus meningkat sejalan dengan peningkatan pendapatan masyarakat, sehingga permintaan konsumsi masyarakat diperkirakan terus meningkat.

Sedangkan investasi diperkirakan akan meningkat sejalan dengan ditetapkannya Perda RTRW Kota Cirebon Tahun 2011-

2031. Dari sisi penawaran, seiring dengan pertumbuhan di sisi permintaan kinerja sektoral diperkirakan tumbuh positif. Pertumbuhan sektoral diperkirakan terutama ditopang oleh pertumbuhan sektor sekunder dan tertier khususnya sub sektor perdagangan, hotel dan restoran serta jasa.

Selain itu, curah hujan yang semakin tinggi diperkirakan akan mempengaruhi kualitas dan jumlah pasokan komoditas-komoditas yang terpengaruh oleh cuaca, seperti cabe merah, sayuran dan buah-buahan. Komoditas lain yang diperkirakan akan memberikan tekanan harga pada kelompok bahan makanan adalah telur ayam ras, daging ayam ras dan minyak goreng. Kelompok lain yang di perkirakan akan memberikan tekanan pada inflasi Kota Cirebon adalah kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar. Komoditas yang diperkirakan akan menyumbang inflasi pada kelompok ini adalah komoditas bahan-bahan bangunan, seperti batu-bata dan semen.

Sementara itu, sumber tekanan harga pada kelompok inti diperkirakan hanya dari bahan bangunan dan emas perhiasan meskipun tidak setinggi pada triwulan sebelumnya. Sedangkan tekanan harga pada kelompok administered price diperkirakan hanya bersumber dari adanya rencana kenaikan tarif tol dan fluktuasi harga BBM non-subsidi. (Sumber : Kajian Ekonomi Regional Wilayah Cirebon TW III Tahun 2011).



3.4. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan keuangan daerah harus dirumuskan secara tepat dan akurat berdasarkan analisis perkembangan ekonomi daerah. Efektifitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2016 tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat dikelola oleh pemerintah daerah. Untuk itu kebutuhan belanja pembangunan daerah akan selalu mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi RKPD. Dengan adanya arah dan kebijakan keuangan daerah yang tepat maka diharapkan kondisi keuangan daerah akan semakin kondusif dalam mendukung berbagai kegiatan pembangunan yang ada di Kota Cirebon.

3.4.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pendanaan penyelenggaraan pemerintah telah diatur sesuai dengan kewenangan yang diserahkan. Hal tersebut dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran, terdiri dari Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan. Disebutkan juga bahwa pendapatan daerah menurut Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 11 merupakan hak pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun terkait. Sebagaimana ketentuan perundang-undangan, pendanaan penyelenggaraan pemerintahan telah diatur

sesuai kewenangan yang diserahkan. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibiayai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan kewenangan yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Pusat dibiayai dari APBN, baik kewenangan pusat yang didekonsentrasikan kepada Gubernur atau dalam rangka tugas pembantuan dan urusan bersama.

Berdasarkan pada hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendanaan daerah, selanjutnya dirumuskan kebijakan di bidang keuangan daerah yang terdiri dari kebijakan pendapatan, belanja dan pendapatan. Kebijakan-kebijakan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015.

Berdasarkan data Tahun 2013-2017, secara keseluruhan pendapatan daerah mengalami peningkatan dengan persentase kenaikan fluktuatif. Secara persentase dan nominal hanya kelompok komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang secara konsisten mengalami kenaikan, sedangkan kelompok dana perimbangan meskipun secara nominal tiap tahunnya mengalami kenaikan, namun kontribusinya terhadap pendapatan daerah tiap tahunnya mengalami penurunan.

Tabel 3.3
Realisasi, Target dan Proyeksi APBD Kota Cirebon
Tahun 2013 s.d. Tahun 2017

NO	URAIAN	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Tahun Berjalan 2015	Proyeksi 2016	Proyeksi 2017
4	PENDAPATAN	1.009.950.398.560,00	1.234.065.935.363,00	1.200.234.008.000,00	1.226.069.219.050,00	1.263.895.848.592,50
4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	206.019.069.047,00	298.539.011.144,00	322.156.575.000,00	335.540.575.000,00	349.595.295.000,00
4 . 1 . 1	Pendapatan Pajak Daerah	92.498.096.461,00	103.861.450.433,00	104.800.000.000,00	113.184.000.000,00	122.238.720.000,00
4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	13.784.018.042,00	16.425.413.981,00	13.943.062.000,00	13.943.062.000,00	13.943.062.000,00
4 . 1 . 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.803.654.544,00	4.230.358.159,00	5.788.980.000,00	5.788.980.000,00	5.788.980.000,00
4 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	96.933.300.000,00	174.021.788.571,00	197.624.533.000,00	202.624.533.000,00	207.624.533.000,00
4 . 2	DANA PERIMBANGAN	630.248.138.233,00	689.248.441.689,00	694.009.646.000,00	705.564.934.000,00	726.191.124.340,00
4 . 2 . 1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	64.517.532.233,00	73.175.370.689,00	72.037.740.000,00	72.037.740.000,00	72.037.740.000,00
4 . 2 . 2	Dana Alokasi Umum	536.884.996.000,00	583.927.691.000,00	577.764.436.000,00	589.319.724.000,00	609.945.914.340,00
4 . 2 . 3	Dana Alokasi Khusus	28.845.610.000,00	32.145.380.000,00	44.207.470.000,00	44.207.470.000,00	44.207.470.000,00
4 . 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	173.683.191.280,00	246.278.482.530,00	184.067.787.000,00	184.963.710.050,00	188.109.429.252,50
4 . 3 . 1	Pendapatan Hibah		1.978.000.000,00	2.100.000.000,00	0,00	0,00
4 . 3 . 3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	54.795.842.750,00	68.713.649.351,00	59.918.461.000,00	62.914.384.050,00	66.060.103.252,50
4 . 3 . 4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	88.285.217.000,00	115.461.722.000,00	122.049.326.000,00	122.049.326.000,00	122.049.326.000,00
4 . 3 . 5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	30.602.131.530,00	60.125.111.179,00	0,00	0,00	0,00



5	BELANJA	975.249.676.763,00	1.194.448.622.457,00	1.253.260.157.000,00	1.264.194.677.980,00	1.328.705.510.862,00
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	523.136.921.216,00	591.328.067.156,00	637.615.106.671,00	696.670.409.291,00	761.181.242.173,00
5.1.1	Belanja Pegawai	476.707.327.036,00	539.865.445.101,00	595.553.026.200,00	655.108.328.820,00	720.619.161.702,00
5.1.4	Belanja Hibah	27.452.202.180,00	41.812.871.618,00	33.233.408.850,00	32.733.408.850,00	32.233.408.850,00
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	18.195.130.000,00	9.259.782.429,00	7.198.800.000,00	7.198.800.000,00	6.698.800.000,00
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik	532.262.000,00	360.914.508,00	723.901.621,00	723.901.621,00	723.901.621,00
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	250.000.000,00	29.053.500,00	905.970.000,00	905.970.000,00	905.970.000,00
5.2	BELANJA LANGSUNG	452.112.755.547,00	603.120.555.301,00	615.645.050.329,00	567.524.268.689,00	567.524.268.689,00
5.2.1	Belanja Pegawai	57.707.273.466,00	59.373.163.943,00	70.021.364.808,00	64.548.271.498,37	64.548.271.498,37
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	224.907.967.616,00	308.513.793.722,00	365.587.624.833,00	337.012.129.496,08	337.012.129.496,08
5.2.3	Belanja Modal	169.497.514.465,00	235.233.597.636,00	180.036.060.688,00	165.963.867.694,55	165.963.867.694,55
	SURPLUS / DEFISIT	34.700.721.797,00	39.617.312.906,00	(53.026.149.000,00)	(38.125.458.930,00)	(64.809.662.269,50)
3	PEMBIAYAAN	79.873.399.119,00	108.427.219.562,00	53.026.149.000,00	38.125.458.930,00	64.809.662.269,50
3.1	PEMBIAYAAN PENERIMAAN DAERAH	87.537.468.509,00	121.590.878.070,00	67.414.413.000,00	45.869.458.930,00	75.053.662.269,50
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	87.467.673.709,00	114.574.121.595,00	67.414.413.000,00	45.869.458.930,00	75.053.662.269,50
	Pencairan Dana Cadangan		7.000.000.000,00	-	-	-

	Penerimaan Kembali Investasi	69.794.800,00	16.756.475,00	-	-	-
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	7.664.069.390,00	13.163.658.508,00	14.388.264.000,00	7.744.000.000,00	10.244.000.000,00
5 . 2	Pembentukan Dana Cadangan				7.500.000.000,00	10.000.000.000,00
5 . 2 . 1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	7.500.000.000,00	13.000.000.000,00	14.144.264.000,00	-	-
5 . 2 . 2	Pembayaran Pokok Utang	164.069.390,00	163.658.508,00	244.000.000,00	244.000.000,00	244.000.000,00
	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	114.574.120.916,00	148.044.532.468,00	-	-	-

3.4.2. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Arah dan kebijakan pendapatan daerah adalah mengoptimalkan potensi-potensi sumber pendapatan daerah dan terus berupaya untuk meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan.

1) Pendapatan Asli Daerah

- a. Pendapatan yang diperoleh daerah berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah. Pendapatan asli daerah dihitung dengan memperhatikan realisasi perkembangan pendapatan, serta prakiraan masing-masing potensi jenis pendapatan asli daerah.
- b. Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2016 diproyeksikan naik sebesar Rp13.384.000.000,00 atau naik sebesar 4,15 % menjadi sebesar Rp335.540.575.000,00 dari APBD Tahun Anggaran 2015 (Murni) sebesar Rp322.156.575.000,00. Kenaikan PAD ini berasal dari:
 - Pajak daerah yang diproyeksikan naik Rp8.384.000.000,00 atau naik sebesar 8,0%.
 - Lain-lain pendapatan daerah yang sah diproyeksikan naik Rp5.000.000.000,00 atau naik sebesar 2,53%. Kenaikan lain-lain pendapatan daerah yang sah ini berasal dari kenaikan pendapatan dari BLUD RSUD Gunung Jati yang naik sebesar Rp5.000.000.000,00 dari APBD Tahun Anggaran 2015 (Murni).



2) Dana Perimbangan

- a. Komponen dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil pajak/bukan pajak dihitung dengan memperhatikan potensi masing-masing jenis pajak.
- b. Dana Perimbangan diproyeksikan naik sebesar 1,67% atau sebesar Rp11.555.288.000,00 menjadi Rp705.564.934.000,00 dari APBD Tahun Anggaran 2015 (Murni) sebesar Rp694.009.646.000,00. Kenaikan Dana Perimbangan ini berasal dari:
 - Dana Alokasi Umum yang diproyeksikan naik Rp11.555.288.000,00 atau naik sebesar 2%.

3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

- a. Komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari pendapatan hibah, dana darurat, DBH pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota, dana penyesuaian dan otsus, serta bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemda lainnya.
- b. Lain-lain pendapatan daerah yang sah diproyeksikan naik sebesar 0,49% atau sebesar Rp895.923.050,00 menjadi Rp184.963.710.050,00 dari APBD Tahun Anggaran 2015 (Murni) sebesar Rp184.067.787.000,00. Kenaikan lain-lain pendapatan daerah yang sah ini berasal dari:
 - Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya yang diproyeksikan naik Rp2.995.923.050,00 atau naik sebesar 5%.

Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan pendapatan daerah antara lain :

- 1) Memantapkan Kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah;
- 2) Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah;



- 3) Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah dengan pemerintah pusat, SKPD penghasil;
- 4) Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya peningkatan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah;
- 5) Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan atau retribusi daerah;
- 6) Meningkatkan peran dan fungsi UPTD dan Balai Penghasil dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan;
- 7) Meningkatkan kualitas pengelolaan asset dan keuangan daerah.

3.4.3. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah Tahun 2016 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Belanja daerah Tahun 2016 dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan bersama yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten.

Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, perekonomian, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak.



Belanja daerah terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung adalah belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan kegiatan dan dapat diukur dengan capaian prestasi kerja yang telah ditetapkan. Jenis belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal. Sedangkan belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak terkait langsung dengan kegiatan yang dilaksanakan dan sulit diukur dengan capaian prestasi kerja yang ditetapkan. Adapun yang termasuk dalam belanja tidak langsung adalah belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.

Belanja daerah Tahun Anggaran 2016 diproyeksikan naik sebesar 0,87% atau sebesar Rp10.934.520.980,00 menjadi Rp1.264.194.677.980,00 dari APBD Tahun Anggaran 2015 (Murni) sebesar Rp1.253.260.157.000,00. Belanja daerah terdiri dari:

1) Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2016 diproyeksikan naik sebesar 9,26% atau sebesar Rp59.055.302.620,00 menjadi Rp696.670.409.291,00 dari APBD Tahun Anggaran 2015 (Murni) sebesar Rp637.615.106.671,00. Proyeksi besaran belanja tidak langsung Tahun Anggaran 2016 ini termasuk di dalamnya belanja dana penyesuaian yang merupakan belanja sertifikasi bagi guru PNS dan akses 2,5% kenaikan belanja pegawai, belanja hibah dan bantuan sosial.

2) Belanja Langsung

Belanja Langsung Tahun Anggaran 2016 diproyeksikan mengalami penurunan sebesar (7,82)% atau sebesar (Rp48.120.781.640,00) menjadi Rp567.524.268.689,00 dari APBD Tahun Anggaran 2015 (Murni) sebesar Rp615.645.050.329,00. Proyeksi besaran belanja langsung



Tahun Anggaran 2016 ini termasuk di dalamnya belanja BLUD RSUD Gunung Jati dan DAK yang merupakan belanja yang bersifat **transitoris** atau belanja yang peruntukannya sudah ditentukan dan besaran belanjanya sama dengan besaran pendapatannya.

Berdasarkan proyeksi indikator makro ekonomi dan IPM, belanja daerah Tahun Anggaran 2016 pada dasarnya diorientasikan untuk peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Untuk itu kebijakan belanja secara umum adalah :

- 1) Memperkuat akuntabilitas belanja langsung yang diarahkan pada target-target sasaran program dan kegiatan yang terkait langsung pada pencapaian indikator kinerja RPJMD Tahun 2013-2018.
- 2) Alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan minimal sebesar 20% dari total belanja dalam rangka peningkatan indeks pendidikan.
- 3) Alokasi anggaran untuk fungsi kesehatan minimal sebesar 10% dari total belanja sesuai perintah UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam rangka peningkatan indeks kesehatan
- 4) Peningkatan alokasi anggaran bidang perekonomian masyarakat dan infrastruktur penunjang perekonomian, dalam rangka peningkatan indeks daya beli.
- 5) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Kebijakan Belanja secara umum dapat dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Penetapan pagu indikatif untuk setiap program dan kegiatan dalam setiap misi hendaknya proporsional;



- b. Secara tugas pokok dan fungsi harus disusun secara adil dan proporsional. Adapun SKPD dengan permasalahan khusus perlu diadakan anggaran penyeimbang.

3.4.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Adapun pembiayaan tersebut bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SilPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah.

Pembiayaan daerah meliputi penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Kebijakan pembiayaan yang timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Sumber penerimaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, transfer dari dana cadangan (DCD), penyertaan modal, pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo dan sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan.

Pembiayaan daerah (netto) Tahun Anggaran 2016 yang dipergunakan untuk menutup defisit, diproyeksikan turun sebesar 28,10% atau turun sebesar Rp14.900.690.070,00 menjadi Rp38.125.458.930,00 dari APBD Tahun Anggaran 2015 (Murni) sebesar Rp53.026.149.000,00. Pembiayaan daerah terdiri dari:

1) Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan pada APBD Tahun Anggaran 2016 dalam hal ini Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) diproyeksikan turun dari SiLPA pada APBD Tahun Anggaran 2015 (Murni) yaitu sebesar 31,96% atau turun sebesar Rp21.544.954.070,00. Penurunan proyeksi



SiLPA ini karena mempertimbangkan realisasi APBD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan bulan april masih jauh dari target. Hal ini mengakibatkan proyeksi Silpa Tahun Anggaran 2016 turun dari SiLPA yang dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2015 (Murni) sebagai antisipasi melonjaknya realisasi belanja pada triwulan IV, sehingga besaran SiLPA Tahun Anggaran 2016 belum dapat diproyeksikan terlalu tinggi.

2) Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan Tahun Anggaran 2016 diproyeksikan turun sebesar 46,18% atau sebesar Rp6.644.264.000,00 menjadi Rp7.744.000.000,00 dari APBD Tahun Anggaran 2015 (Murni) sebesar Rp14.388.264.000,00. Pengeluaran pembiayaan ini berasal dari:

- a. Pembentukan Dana Cadangan dalam rangka Pemilihan Walikota Cirebon Tahun 2018, pembentukan dana cadangan ini dilakukan selama 2 (dua) tahun anggaran mulai tahun 2016 sampai tahun 2017. Pada tahun 2016, penganggaran dana cadangan sebesar Rp7.500.000.000,00 dengan terlebih dahulu membentuk Perda tentang Dana Cadangan.
- b. Pembayaran pokok hutang sebesar Rp244.000.000,00.

3.5. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan keuangan daerah harus dirumuskan secara tepat dan akurat berdasarkan analisis perkembangan ekonomi daerah. Efektifitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2016 tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat dikelola oleh pemerintah daerah. Untuk itu kebutuhan belanja pembangunan daerah akan selalu



mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi RKPD. Dengan adanya arah dan kebijakan keuangan daerah yang tepat maka diharapkan kondisi keuangan daerah akan semakin kondusif dalam mendukung berbagai kegiatan pembangunan yang ada di Kota Cirebon.

3.5.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pendanaan penyelenggaraan pemerintah telah diatur sesuai dengan kewenangan yang diserahkan. Hal tersebut dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran, terdiri dari Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan. Disebutkan juga bahwa pendapatan daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 11 merupakan hak pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun terkait. Sebagaimana ketentuan perundang-undangan, pendanaan penyelenggaraan pemerintahan telah diatur sesuai kewenangan yang diserahkan. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibiayai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan kewenangan yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Pusat dibiayai dari APBN, baik



kewenangan pusat yang didekonsentrasikan kepada Gubernur atau dalam rangka tugas pembantuan dan urusan bersama.

Berdasarkan pada hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendanaan daerah, selanjutnya dirumuskan kebijakan di bidang keuangan daerah yang terdiri dari kebijakan pendapatan, belanja dan pendapatan. Kebijakan-kebijakan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015.

Berdasarkan data Tahun 2013-2017, secara keseluruhan pendapatan daerah mengalami peningkatan dengan persentase kenaikan fluktuatif. Secara persentase dan nominal hanya kelompok komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang secara konsisten mengalami kenaikan, sedangkan kelompok dana perimbangan meskipun secara nominal tiap tahunnya mengalami kenaikan, namun kontribusinya terhadap pendapatan daerah tiap tahunnya mengalami penurunan.



Pemerintah Kota Cirebon